



**BADAN KEAHLIAN
DPR RI**
*Bridging research to parliament
Evidence based policy making*

WONDERFUL INDONESIA AWARDS: MOMENTUM KOLABORASI MENUJU PARIWISATA BERKELANJUTAN

Lisnawati

Analisis Legislatif Ahli Muda

lisnawati@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Industri pariwisata Indonesia merupakan salah satu sektor unggulan yang memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional, penciptaan lapangan kerja, serta promosi budaya dan kekayaan alam Indonesia di tingkat global. Namun, perkembangan sektor ini tidak terlepas dari berbagai tantangan struktural seperti isu keberlanjutan, ketergantungan pada destinasi tertentu, serta kerentanan terhadap krisis global seperti pandemi dan perubahan iklim.

Ajang Wonderful Indonesia Awards (WIA) hadir sebagai bentuk apresiasi terhadap peran pemerintah, pelaku industri, komunitas, dan media dalam mendorong pariwisata yang berdaya saing sekaligus berkelanjutan. Momentum ini menjadi krusial untuk memperkuat narasi kolaborasi lintas sektor yang tidak hanya berfokus pada peningkatan jumlah kunjungan wisatawan, tetapi juga pada kualitas pengalaman wisata, pelestarian lingkungan, serta kesejahteraan masyarakat lokal.

Isu utama yang perlu dijawab adalah bagaimana menjadikan WIA sebagai instrumen strategis dalam mengakselerasi pariwisata berkelanjutan, bukan sekadar seremoni penghargaan. Tantangan *pertama* yang dihadapi adalah konsistensi dalam implementasi prinsip pariwisata berkelanjutan. Banyak destinasi wisata masih berorientasi pada target kuantitatif kunjungan wisatawan, sementara aspek daya dukung lingkungan dan partisipasi masyarakat belum optimal. Hal ini berisiko menimbulkan *overtourism*, degradasi lingkungan, dan konflik sosial.

Tantangan *kedua* adalah koordinasi antarkementerian dan pemerintah daerah masih belum sepenuhnya terintegrasi. Selama ini pariwisata kerap dipandang sebagai tanggung jawab eksklusif Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), padahal keberlanjutan sektor ini juga melibatkan Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Koperasi, dan Kementerian UMKM, serta pemerintah daerah. Ajang penghargaan seperti WIA seharusnya mampu menjadi platform penghubung kebijakan lintas sektor.

Tantangan *ketiga* adalah penguatan kapasitas pelaku lokal masih menjadi pekerjaan rumah. UMKM sektor pariwisata, pelaku ekonomi kreatif, dan komunitas masyarakat kerap menghadapi keterbatasan akses pembiayaan, digitalisasi, dan sertifikasi standar layanan. Padahal, keberlanjutan pariwisata sangat ditentukan oleh keterlibatan masyarakat setempat sebagai penerima manfaat utama.

Tantangan *keempat* menyangkut aspek promosi dan branding Wonderful Indonesia yang masih perlu ditopang dengan data dan teknologi digital. Tren wisata global mengarah pada personalisasi pengalaman, *eco-tourism*, dan *green destination*. Tanpa pemanfaatan *big data*, *artificial intelligence* (AI), dan platform digital terpadu, Indonesia berisiko tertinggal dalam memetakan preferensi wisatawan global dan mempromosikan destinasi secara efektif.

Tantangan *terakhir* adalah minimnya regulasi dan insentif bagi pengelola destinasi dan pelaku usaha sektor pariwisata yang mengadopsi prinsip keberlanjutan. Saat ini belum tersedia skema insentif fiskal atau pembiayaan hijau yang secara langsung mendukung praktik pariwisata yang ramah lingkungan, konservatif, dan inklusif.

Dengan demikian, tantangan utama bukan hanya bagaimana menjaga momentum WIA sebagai simbol apresiasi, melainkan bagaimana menjadikannya sebagai titik tolak kolaborasi strategis untuk memperkuat ekosistem pariwisata berkelanjutan Indonesia. Tanpa langkah konkret, penghargaan hanya akan menjadi ajang seremonial yang kehilangan daya dorong transformatif.

Atensi DPR

Komisi VII DPR RI yang membidangi sektor pariwisata perlu memberikan perhatian khusus terhadap peran strategis WIA. Fungsi legislasi harus diarahkan untuk mendorong regulasi yang menetapkan standar destinasi ramah lingkungan, skema insentif fiskal bagi pelaku usaha sektor pariwisata berkelanjutan, serta kerangka kolaborasi antarkementerian dan pemerintah daerah. Fungsi anggaran dapat difokuskan pada dukungan terhadap digitalisasi promosi, pemberdayaan UMKM lokal, dan pengembangan infrastruktur hijau di destinasi wisata. Sementara itu, fungsi pengawasan Komisi VII DPR RI perlu memastikan konsistensi implementasi prinsip keberlanjutan agar pariwisata tidak hanya menjadi “mesin ekonomi” jangka pendek, tetapi juga instrumen pembangunan berkelanjutan. Komisi VII DPR RI juga perlu menjamin bahwa masyarakat lokal memperoleh manfaat langsung, baik melalui peningkatan pendapatan, kesempatan kerja, maupun pelestarian budaya. Dengan demikian, WIA bukan sekadar ajang penghargaan, melainkan momentum nyata untuk membangun pariwisata Indonesia yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Sumber

travel.detik.com, 29 Agustus 2025;
kemenpar.go.id, 13 Agustus 2025; dan
travelweekly.com.au, 28 Agustus 2025.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

EDITOR

Polhukam

Ahmad Budiman
Prayudi
Rachmi Suprihartanti S.
Novianti

Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.
Mandala Harefa
Ari Muliarta Ginting
Eka Budiyantri
Edmira Rivani
Teddy Prasetiawan

Kesra

Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola
Yulia Indahri

LAYOUTER

Devindra Ramkas O.
Ully Ngesti Pratiwi
Desty Bulandari
Yustina Sari

Firyal Nabihah
Ulayya Sarfina
Yosua Pardamean S.
Jeffrey Ivan Vincent
Fauzan Lazuardi R.
Anugrah Juwita Sari

Timothy Joseph S. G.
Nur Sholikhah P. S.
Fieka Nurul Arifa



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

©PusakaBK2025



Bridging Research to Parliament
Evidence Based Policy Making